

## ABSTRAK

Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa jika ternyata mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris sebagai orang yang tidak dapat dipercaya, sehingga hal tersebut antara jabatan Notaris dan pejabatnya (yang menjalankan tugas jabatan Notaris) harus sejalan bagaikan dua mata sisi uang yang tidak dapat dipisahkan. Notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara nyata diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pengawasan dan pembinaan diperlukan agar Notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi, dengan tujuan demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris dalam hal ini yang berwenang adalah Majelis Pengawas Notaris (MPN).

Tujuan Penelitian yaitu untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan dan penegakan sanksi terhadap Notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara nyata di kota Tegal, Untuk menganalisis kendala dan solusinya pelaksanaan pengawasan dan penegakan sanksi terhadap Notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara nyata di kota Tegal.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwa Notaris yang telah melakukan pelanggaran harus menerima konsekuensinya, yaitu mendapatkan sanksi. Masih banyak calon-calon Notaris yang masih menunggu formasi jabatan di setiap daerah. Apabila tidak berkompeten dalam menjalankan tugas jabatannya, maka Majelis Pengawas Notaris dalam hal ini adalah MPP yang akan memberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Dasar Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

**Kata Kunci : Pengawasan Notaris, Penegakan Sanksi, Jabatan Notaris**

## ABSTRACT

Notary as a position of trust means nothing if it turns out that those who carry out their duties as Notary Public are untrustworthy, so that between the position of the Notary and the official (who is carrying out the duties of the position of Notary) must be in line like the two sides of a coin that cannot be separated. Notaries who do not actually carry out their positions are regulated in Article 7 of the Law on Notary Position Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions. Supervision and guidance is needed so that the Notary in carrying out his duties and responsibilities as given by the relevant basic regulations, is always carried out on a predetermined path, not only the legal route, but also on the basis of moral and professional ethics, with the aim of ensuring legal protection and certainty. Law for the public who uses Notary services, in this case the authorized party is the Notary Supervisory Council (MPN)

The purpose of this research is to analyze the implementation of supervision and enforcement of sanctions against notaries who do not actually carry out their positions in the city of Tegal. To analyze the constraints and solutions to the implementation of supervision and enforcement of sanctions against notaries who do not carry out their positions in real terms in the city of Tegal.

The method used in this research is the juridical empirical method, which is a legal research method that seeks to see the law in a real sense or can be said to see, examine how the law works in society.

The results of this study ultimately provide an answer that the notary who has committed a violation must accept the consequences, namely getting sanctions. There are still many Notary candidates who are still waiting for the formation of positions in each region. If they are not competent in carrying out their duties, the Notary Supervisory Council in this case is the MPP which will impose a sanction of dishonorable discharge, in accordance with Article 7 of the Law on Notary Position Number 2 of 2014 concerning Amendments to the Basis of Law Number 30 of 2004 regarding the Position of Notary Public.

**Keywords: Notary Supervision, Enforcement of Sanctions, Notary Position**